

**UPAYA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM
MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR DAYUN DI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2010-2013**

Prihadi Trisno Anggoro
trisnoangoro@gmail.com

Drs. H. Ishak, M.Si

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstrak

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yaitu No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi retribusi Pelayanan Pasar.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua upaya dalam meningkatkan retribusi Pasar Dayun, yaitu upaya Normatif dan empirik, upaya normatif terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 22 Tahun 2011 tentang Retribusi retribusi Pelayanan Pasar, SK Bupati Siak, dan upaya empirik terdiri dari pengaturan tempat berdagang, penambahan fasilitas, pengawasan lapangan, dan pelatihan dan Penyuluhan Sehingga oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Upaya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam Meningkatkan Retribusi Pasar Dayun di Kabupaten Siak Tahun 2010-2013”.

Kata Kunci : Retribusi, Pasar Dayun, otonomi daerah

**THE EFFORT OF DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
IN IMPROVING DAYUN MARKET RETRIBUTION IN KABUPATEN
SIAK**

YEAR 2010-2013

Prihadi Trisno Anggoro
trisnoangoro@gmail.com

Drs. H. Ishak, M.Si

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstract

The application of Otonomi Daerah (local autonomy) is focusing on area of Kabupaten and Kota. The local government of Kabupaten Siak develops funding mechanism by exploring several kinds of funding format that is potential to support local development and in the same time improve the quality of service, infrastructures for market, especially traditional market. Among all the retribution in Kabupaten Siak, sanitation (kebersihan) and garden affairs (perkebunan) is market services retribution based on Siak local rules (peraturan daerah kabupaten siak no 22 tahun 2011) about retribution of market services.

Result shows that there are two kinds of effort in improving Dayun market retribution, which are norms (peraturan daerah kabupaten siak no 22 tahun 2011 about retribution of market services, SK of Bupati Siak,) and empirical effort consist of space for trading rules, improving facilities, field inspection, and training. That's why writer entitled this reseach as " The effort of Dinas Pasar, Kebersihan and pertamanan in improving Dayun market retribution in kabupaten siak year 2010-2013"

Key word: retribution, dayun market, local autonomy

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Dalam prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya bersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri. Era otonomi daerah menuntut kabupaten/kota menggali secara

intensif dan bijaksana sumber-sumber pendapatan asli daerah. Peluang memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak masih didominasi dari pajak dan retribusi. Salah satu retribusi penting yang diandalkan di Kabupaten Siak adalah Retribusi Pasar karena selama ini pendapatan asli daerah disumbang hampir 20%-30% dari sektor retribusi dan salah satu penyumbang potensial adalah retribusi pasar.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yaitu No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi retribusi Pelayanan Pasar.

Tabel Matriks Klasifikasi Pedagang pasar Dayun tahun 2013

No	Klasifikasi Pedagang	Jumlah	Retribusi
1	Pedangang Tetap/Ruko	35	Rp.2500
2	Pedagang Kios	47	Rp.2500
3	Pedagang Lapak	48	Rp.2500

Sumber Data : Hasil Olahan penulis

Untuk dapat meningkatkan sumbangan hasil retribusi pasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), tentu saja perlu dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak yang secara langsung berhubungan dengan penarikan retribusi pasar, yaitu manajer pengelola pasar dan jajarannya yang bertugas mengelola

Pelaksanaan peningkatan target retribusi daerah yang berjalan baik dan tertib, maka kontribusi yang akan diberikan oleh retribusi daerah yang dalam penelitian ini adalah terkait dengan retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan daerah akan lebih besar. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar, semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, secara otomatis akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal tersebut tentunya akan dapat menunjang pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, secara otomatis akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal tersebut tentunya akan dapat menunjang pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang

dan menarik retribusi pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikatakan pungutan retribusi untuk pedagang sebesar Rp. 2.500,-/hari dan mencakup jenis dagang campuran (Rokok, Makanan Kecil, Minuman Ringan, Buah-buahan, dan Lain sejenisnya yang berkemasan).

berjudul ***“Upaya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam Meningkatkan Retribusi Pasar Dayun di Kabupaten Siak Tahun 2010-2013”***.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak, Kantor Camat Dayun, Pasar Dayun, Kantor DPRD Kabupaten Siak. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan upaya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Retribusi Pasar Dayun Tahun 2010-2013.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Dayun

1.1. Upaya Normatif

a. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak yaitu No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi retribusi Pelayanan Pasar. Dalam Prinsip Dan Sasaran

Penetapan Tarif Retribusi yang terdapat dalam Pasal 7 mengatakan:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Selain itu dalam hal Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran yang terdapat pada pasal 8 dikatakan diantaranya:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

3. Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.
5. Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi

- disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. Besarnya retribusi yang terutang.
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
 - a. Angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - b. Penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
 8. Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
- Dari uraian Peraturan Daerah diatas dapat diketahui bahwa dalam pasal 7 bermaksud memberikan pertimbangan terhadap kemampuan para pedagang yang berjualan di Pasar Dayun, sehingga dengan adanya peraturan Daerah ini akan terlihat jelas mengenai kedudukan pedagang pasar dayun secara normatif di Kabupaten Siak. Pada prinsipnya, pengelolaan pasar yang baik akan memberikan hasil yang maksimal dalam penerimaan APBD suatu Kabupaten/Kota, tidak terkecuali Kabupaten Siak.
- b. Surat Keputusan Bupati Siak**

Berasarkan surat saudara Nomor : 100/PEM/Kec. Dayun/II/2009/71 Tanggal 23 Februari 2006, perihal laporan kondisi Lahan Pasar Dayun. Menindak lanjuti hal tersebut. Saudara untuk dapat melakukan tindakan mengantisipasi perluasan lahan tersebut, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pasar oleh pihak pengelola pasar tentang pemanfaatan lahan harus berdasarkan luas lahan yang diserahkan oleh pihak PT. Caltex Pasific Indonesia (PT. CPI) kepada pihak Pemerintah Desa Dayun sesuai dengan berita acara serah terima yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 1999.
2. Terhadap pengembangan lahan pasar yang telah melebihi luas sebagaimana tertulis diberita acara serah terima tersebut, khususnya terhadap lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang telah dipergunakan oleh pihak pemerintah Desa dan Pengelola Pasar agar dapat segera ditertibkan.
3. Selanjutnya terhadap pengembangan bangunan pasar, harus

memperhatikan jarak sesuai dengan keindahan, estetika kota dan tata ruang Kota, khususnya jarak antara pasar dengan kantor polres Siak dan Komplek Perkantoran Camat Dayun.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut diperintahkan kepada saudara untuk segera melakukan kordinasi dengan melibatkan pengelola pasar, Kepala Desa Dayun, dan Instansi Terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan, lahan pasar tersebut.

Dari uraian SK Bupati Siak, dapat di ketahui bahwa pembangunan dan pengembangan Pasar Dayun dilakukan oleh PT. Caltex Pasific Indonesia yaitu pada tahun 1999 dengan pihak pemerintah Desa Dayun. Lahan yang digunakan tertulis jelas yakni milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak agar digunakan bagi pembangunan dan pengembangan Pasar Dayun. Selain itu pembanangunan pasar harus sesuai dengan tata ruang kota, ksususnya jarak dengan kantor polres dan komplek perkantoran camat Dayun.

1.2. Upaya Empirik

a. Pengaturan Tempat Berdagang

Dalam pengaturan tempat berdagang di pasar Dayun, dinas pasar telah menetapkan pembagian tempat berdagang yaitu:

1. Sebelah barat khusus pedagang makanan dan sembako
2. Sebelah timur khusus toko bangunan
3. Sebelah selatan khusus pakaian
4. Sebelah utara khusus toko elektronik.

b. Penambahan Fasilitas

Penambahan fasilitas yang dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah perbaikan kios-kios yang telah mengalami kerusakan. Sehingga renovasi itu dilaksanakan dalam kurun waktu lima bulan setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh anggota tim pengawas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. hal ini dilakukan agar apabila terjadi kerusakan langsung ada perbaikan meskipun kurun waktu yang diberikan cukup lama yaitu lima bulan sekali.

c. Pengawasan lapangan

Dalam hal ini dinas pasar kebersihan dan pertamanan Kabupaten

Siak juga melakukan pengawasan di lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan ketika hari pasaran berlangsung (Senin dan Kamis). Instansi yang dikerahkan untuk melakukan pengawasan agar terciptanya ke amanan yaitu bekerja sama dengan organisasi Pemuda Pancasila. Tugas pemuda pancasila ini yaitu berjaga-jaga, mengontrol untuk memberikan rasa aman kepada penjual dan pembeli yang ada di lingkungan pasar pada saat hari pasaran sedang berlangsung.

d. Pelatihan dan Penyuluhan

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak memberikan pelatihan dan pendidikan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Pelatihan untuk Pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi, hal ini sudah diberikan beberapa kali untuk pegawai Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Dayun

a. Analisis Faktor Internal

1. Belum Maksimalnya Pengelolaan Pasar

Misi menjelaskan tujuan dibentuknya suatu organisasi, atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukannya, sedangkan mandat mendefinisikan apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan oleh otoritas eksternal. khususnya retribusi pasar belum dapat dilakukan secara maksimal meskipun

2. Keterbatasan Anggaran

Biaya pemeliharaan Pasar Dayun tiap tahunnya sudah terpenuhi, karena biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sudah berdasarkan kebutuhan yang diajukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel tentang biaya pemeliharaan Pasar Dayun sebagai berikut:

Tabel Tabel Biaya Pengelolaan Pasar Dayun

No	Tahun	Biaya Pemeliharaan
1.	2010	49.072.000
2.	2011	40.287.000
3.	2012	37.192.000

Sumber : Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak tahun 2012

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan biaya pemeliharaan cukup memberikan kemudahan bagi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak, Karena

2. Kualitas SDM Birokrasi Rendah

Aspek sumber daya manusia, sudah dijelaskan bahwa kuantitas dan kualitas aspek ini terasa cukup memperhatikan karena dengan beban kerja yang cukup tinggi belum mendapatkan dukungan dari personalia/pegawai yang mencukupi jumlahnya dan kurang kualitasnya.

2. Kesadaran Pedagang

Hal tersebut dibuktikan dengan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kondisi pedagang maupun lingkungan pasar baik yang

penentuan biaya pengelolaan yang berdasarkan kebutuhan tentunya diharapkan tidak akan menghambat Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas.

Aspek sumber daya dalam lingkungan organisasi akan mencakup manusia, ekonomi, informasi dan kompetensi atau kecakapan. Sumber daya suatu organisasi dapat dinilai dari ketersediaannya atau cukup tidaknya variasinya, tentunya semua ini sangat tergantung dari kebutuhan organisasi.

disampaikan secara pribadi maupun kolektif oleh Para Pedagang jarang ditanggapi dengan baik oleh pengelola pasar. Bukti lain juga ditunjukkan oleh kondisi pasar yang mengalami kebocoran cukup serius

disebagian besar bagian pasar tidak segera mendapatkan perhatian. Padahal akibat dari kondisi tersebut jalanan dalam pasar menjadi tergenang air (becek) sehingga menyebabkan keenganan bagi para pembeli untuk memasuki pasar. Kurangnya perhatian terhadap wajib retribusi menjadi kelemahan suatu organisasi, karena kalau sikap ini dibiarkan bukan tidak mungkin ke depan akan menjadi salah satu faktor penyebab makin berkurangnya jumlah pedagang pasar.

3. Mekanisme Penarikan Retribusi Tidak Jelas

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besar nya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

Tata cara penagihan yang terkesan sangat lemah Hal ini dapat dilihat dari beberapa butir pasal 19 diantaranya:

- a. Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang masih dalam jangkauan daya pengaruh pengelola organisasi, meskipun tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi setidaknya pengelola organisasi masih dapat mempengaruhi sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi, yang masuk dalam kategori faktor ini adalah situasi Pasar, dukungan lembaga terkait dan pesaing. Sehubungan dengan faktor-faktor ini yang perlu di lakukan oleh pengelola organisasi terutama adalah pengembangan daya pengaruhnya guna menunjang efektifitas strategi yang dijalankan, lingkungan eksternal dapat dibedakan atas beberapa faktor atau kecenderungan sebagai berikut.

1.Faktor Politik

Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (publik interes) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.22 tahun 1999, Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada

pemerintah daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

2.Faktor Ekonomi

Peningkatan daya beli masyarakat, jumlah penduduk merupakan faktor eksternal yang perlu dicermati dalam proses penentuan strategi organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang adaktif dengan perubahan yang ada. Misalnya dalam menentukan tarif retribusi pasar. Menentukan target penerimaan retribusi dan potensi yang ada sehingga misi organisasi sebagai penghasil pendapatan dapat diwujudkan.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan secara riil dinamika pembangunan daerah tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut memberikan sinyal bahwa roda perekonomian di Kabupaten Siak telah mampu menompang serta menggerakkan seluruh sektor ekonomi dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya. Ini akan memberikan dampak yang baik bagi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya mencari strategi pengelolaan pasar.

3.Faktor Sosial

Faktor sosial dapat berupa perubahansoial yang ada dalam masyarakat seperti perubahan tingkah laku, sikap, prefensi, kebiasaan, kualitas, jumlah distribusi dan komposisi penduduk. Semua perubahan seperti ini dapat dapat mempengaruhi *supply and demand* dari barang dan jasa yang ada pada organisasi publik.

Kecamatan Dayun merupakan kecamatan yang cukup berpotensi dalam pengembangan pasar. Ini akan menjadi peluang tersendiri karena Pasar Dayun terletak di Kecamatan Dayun. Pada Faktor eksternal, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan berpengaruh pada pengelolaan Pasar Dayun.

1. Faktor Teknologi

Ketersediaan dan variasi teknologi sebagai faktor teknologi perlu di analisis karena peranannya dalam membantu proses kerja dari suatu organisasi atau sebaiknya justru mengancam nasib suatu organisasi. Perkembangan disiplin ilmu baik untuk pengetahuan yang bersifat teknis maupun manajerial dibidang pengelolaan keuangan daerah terus berkembang, penggunaan alat elektronik, seperti komputer dalam pengelolaan pasar sebagai sarana penerimaan daerah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi sejalan dengan perkembangan objek-objek penerimaan daerah. Penanganan yang lebih cepat, mudah, sederhana, efesien dan efektif telah mengharuskan organisasi untuk memanfaatkan teknologi yang terus berkembang tersebut.

Namun pemanfaatan teknologi akan lebih maksimal jika diikuti dengan upaya untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut, tersedianya tenaga kerja yang terampil merupakan upaya adaptasi yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. Dengan tingkat pendidikan pegawai Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang

cenderung baik, upaya pemanfaatan teknologi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pelanggan

Banyak kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, mereka mungkin menjadi pelanggan/klien dari pelayanan atau jasa yang di hasilkan organisasi. Preferensi sikap, dan tingkah laku mereka akan mempengaruhi dinamika kerja organisasi. Ada pihak-pihak lain yang juga bersama-sama dengan organisasi publik berkompetisi dalam merebut pasaran atau sumber daya yang sudah langka, mereka adalah kompetitor. Juga ada pihak di masyarakat yang mengajak kerja

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kinerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pengelolaan pasar Dayun masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan efektifitas pengelolaan retribusi pasar, dengan membandingkan pendapatan retribusi pasar dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengelolaan Pasar Dayun dalam jangka waktu satu tahun.
2. Rendahnya kecakapan dan keahlian yang dimiliki para pengelola pasar. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya langkah kreatif dalam hal pengelolaan Pasar Dayun, karena bekerja yang sifatnya hanya bersifat rutinitas hal inilah yang membuat belum

sama dalam menghasilkan suatu produk tertentu atau malah bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang sama. Hubungan dengan mereka sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Untuk menguragi resiko kompetitor pasar yang ada di Kecamatan Dayun, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan telah menjalin kerja sama dengan salah satu pedagang dari kecamatan tualang untuk membuka cabang di Pasar Dayun, hal ini juga dimaksud untuk menambah variasi bentuk dagangan dan seraya menarik pengunjung untuk datang berkunjung ke Pasar Dayun.

adanya langkah strategis dalam hal pengelolaan pasar.

3. Masih kurangnya langkah strategis dalam hal mengatasi masih banyaknya kios tak terpakai, hal inilah yang merupakan penyebab tidak optimalnya pengelolaan Pasar Dayun dilihat dari pendapatan retribusinya
4. Belum jelasnya prosedur pengawasan di lingkungan Pasar Dayun sehingga mempengaruhi kinerja organisasi dalam hal pengelolaan dan upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar.
5. Masih rendahnya penegakan hukum sehingga berpengaruh terhadap upaya pencapaian organisasi. Selama ini setiap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pedagang belum ada sanksi yang tegas yang

diberikan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Misalnya bila ada pedagang menunggak sewa bulanan maka petugas sulit menindak, karena sanksi tidak di dukung dengan aturan yang jelas.

SARAN

1. Bagaimana meningkatkan kompetensi pengelola pasar di Kabupaten Siak dalam upaya mewujudkan misi organisasi baik dalam pelayanan dan pengelolaan maupun peningkatan penerimaan retribusi Pasar Dayun diperlukan strategi yang tepat antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas dan keterampilan pengeolah pasar dayun melalui jalur pendidikan maupun dengan berbagai pelatihan dan kursus.
 - b. Upaya sosialisasi tentang misi organisasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi oleh pihak manajemen kepada semua aparat dilingkungan Pasar Dayun perlu dilakukan untuk memperoleh kesatuan gerak dan persepsi.
 - c. Penerapan disiplin kerja serta pengamalan dan penanaman metode pelaksanaan tugas efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Alex S Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma S.S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djakarta: PT. Djamatan.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibuan, 2000, *Pelimpahan Wewenang*, jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HAW. Widjaja.2002, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arif Nasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Koentjraningrat(ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.
- Ramlan Subakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Syarifudin Hidayat, (2002). *Metodelogi Penelitian*.Bandung: Mandar Maju.

- Siagian, Sondang P Siagian, (1982).
Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan.
Jakarta : Erlangga.
- Sukanto.(2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi.* Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah,*
Yogyakarta: Lukman Offset.
- Taliziduhu Ndraha, 2003,
Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1,
Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Winardi.1979. *Azas-Azas Manajemen,* Alumni
Bandung: Bandung

a. Sumber Jurnal

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Natuna : Pembangunan dan Otonomi Daerah,
(Pekanbaru:1996), Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau.

b. Sumber Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang *Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Siak
No. 22 tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*